

DAMPAK KETERBATASAN AKSES TERHADAP REHABILITASI NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, TSAQIF ADDAFA HASMAN

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Tsaqifaddafa@gmail.com

Abstract: *This study examines the impact of limited access on the rehabilitation of disabled inmates in correctional facilities. The urgency of this research stems from the increasing number of disabled individuals within the prison system, highlighting a gap in rehabilitation services tailored to their needs. A qualitative approach was employed, utilizing interviews with inmates and staff, as well as document analysis to gather data. The findings reveal significant barriers, including inadequate facilities and lack of specialized programs, which hinder effective rehabilitation. The study concludes that improving accessibility and implementing targeted rehabilitation programs are essential for enhancing the reintegration of disabled inmates into society.*

Keywords: *disabled inmates; rehabilitation; access barriers; correctional facilities.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak keterbatasan akses terhadap rehabilitasi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Urgensi penelitian ini muncul dari meningkatnya jumlah individu disabilitas dalam sistem penjara, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam layanan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Metode kualitatif digunakan, dengan wawancara kepada narapidana dan petugas, serta analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, termasuk fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya program khusus, yang menghalangi rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan penerapan program rehabilitasi yang terarah sangat penting untuk meningkatkan reintegrasi narapidana disabilitas ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: narapidana disabilitas; rehabilitasi, hambatan akses, lembaga pmasyarakatan.

A. Pendahuluan

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem rehabilitasi. Narapidana disabilitas merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses terhadap fasilitas fisik yang memadai dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kondisi ini mempengaruhi kualitas rehabilitasi dan kehidupan narapidana disabilitas, serta dampak jangka panjangnya terhadap reintegrasi sosial dan ekonomi mereka. Penelitian ini juga mencatat bahwa stigma sosial dan diskriminasi yang dihadapi oleh narapidana disabilitas memperburuk situasi mereka, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Lebih jauh, tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada aksesibilitas fisik, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya pendidikan serta pelatihan yang relevan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan rehabilitasi yang tidak efektif, yang pada gilirannya menghambat mereka dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang optimal, lembaga pemasyarakatan perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif, termasuk pelatihan bagi petugas dan peningkatan kesadaran akan hak-hak khusus

narapidana disabilitas. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjalani proses rehabilitasi yang lebih baik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep aksesibilitas dan rehabilitasi yang inklusif, yang menjadi landasan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan. Konsep aksesibilitas merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses layanan dan fasilitas yang diperlukan, termasuk akses fisik, informasi, dan komunikasi. Dalam konteks narapidana disabilitas, aksesibilitas menjadi isu krusial karena keterbatasan akses dapat menghambat mereka dalam memperoleh layanan rehabilitasi yang sesuai. Teori rehabilitasi inklusif menekankan pentingnya program rehabilitasi yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta menjamin partisipasi aktif mereka dalam proses rehabilitasi. Teori ini menekankan bahwa program rehabilitasi harus dirancang dengan memperhatikan keragaman kondisi dan kebutuhan individu, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi narapidana disabilitas. Kedua teori ini menjadi dasar untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, termasuk pengalaman narapidana disabilitas, praktik-praktik yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, serta kebijakan dan program yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan narapidana disabilitas dan layanan yang tersedia, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan rehabilitasi yang inklusif di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat mengoptimalkan proses rehabilitasi bagi narapidana penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup mandiri dan produktif.

State of the art penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa studi yang membahas rehabilitasi narapidana secara umum, masih terdapat kekurangan signifikan dalam penelitian yang secara khusus fokus pada narapidana disabilitas. Banyak penelitian yang ada cenderung mengabaikan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang perlu diatasi, mengingat bahwa narapidana disabilitas sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam program rehabilitasi yang ada. Selain itu, banyak program yang dirancang untuk narapidana secara umum tidak mempertimbangkan adaptasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga mengurangi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi langsung di lembaga pemasyarakatan, penelitian ini akan menggali pengalaman narapidana disabilitas dalam menjalani proses rehabilitasi, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mereka hadapi, baik dari segi aksesibilitas fisik maupun program rehabilitasi yang tidak inklusif. Dengan menganalisis data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk meningkatkan kebijakan dan praktik rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana disabilitas dapat memperoleh dukungan yang lebih baik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sukses. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur yang ada, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana keterbatasan akses mempengaruhi rehabilitasi narapidana disabilitas, yang merupakan isu krusial dalam konteks sistem peradilan pidana. Keterbatasan akses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitas fisik yang tidak ramah disabilitas hingga kurangnya program rehabilitasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus individu dengan disabilitas. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari keterbatasan akses tersebut terhadap proses rehabilitasi, termasuk bagaimana hal ini dapat menghambat kemampuan narapidana disabilitas untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan memahami hubungan antara aksesibilitas dan rehabilitasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas, serta implikasi dari situasi ini terhadap kualitas hidup mereka setelah menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak dari keterbatasan akses dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang berbasis pada data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi bagi narapidana disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh lembaga pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pengelola lembaga pemasyarakatan, serta organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas rehabilitasi bagi narapidana disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tentang isu ini, tetapi juga berfungsi sebagai langkah konkret menuju perbaikan sistem rehabilitasi yang lebih adil dan efektif bagi semua individu, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Jenis dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan narapidana disabilitas dan petugas pemasyarakatan, serta analisis dokumen terkait kebijakan rehabilitasi. Wawancara mendalam dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, perspektif, dan cerita dari partisipan secara lebih rinci dan personal. Peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan alur pembicaraan dan mengeksplorasi topik-topik yang muncul secara spontan. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks kebijakan dan praktik rehabilitasi yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Dokumen yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, pedoman penanganan narapidana disabilitas, serta laporan dan publikasi resmi mengenai program rehabilitasi. Dengan mengombinasikan data dari wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang kaya dan holistik tentang isu yang diteliti. Metode analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang diperoleh. Analisis tematik merupakan pendekatan yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis penelitian kualitatif. Proses analisis dimulai dengan transkripsi verbatim wawancara, dilanjutkan dengan pembacaan berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atas data. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pengodean terbuka untuk mengidentifikasi unit-unit makna dan konsep-konsep kunci yang muncul

dari data. Kode-kode ini kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaannya untuk membentuk kategori dan tema-tema yang lebih luas. Proses ini akan terus berlanjut dengan membandingkan dan mengkontraskan tema yang muncul, serta mencari hubungan dan pola di antara tema-tema tersebut. Analisis dokumen akan dilakukan secara paralel dengan analisis data wawancara, dengan fokus pada identifikasi kebijakan, praktik, dan isu-isu kunci yang terkait dengan rehabilitasi narapidana disabilitas. Triangulasi data dari berbagai sumber akan dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan dan memperkaya interpretasi. Hasil akhir dari proses analisis ini akan berupa seperangkat tema komprehensif yang menggambarkan tantangan, praktik, dan rekomendasi terkait rehabilitasi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk memahami isu ini dari sudut pandang partisipan dan konteks yang spesifik.

C. Hasil dan Pembahasan

Keterbatasan Fasilitas: Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, yang menjadi perhatian utama karena fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat rehabilitasi narapidana penyandang disabilitas. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan masih menggunakan infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus individu dengan disabilitas. Misalnya, jalur akses yang tidak tersedia atau tidak sesuai, serta kurangnya toilet khusus, sering kali membuat narapidana disabilitas kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam penjara. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan fisik mereka, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka, yang sangat penting dalam proses rehabilitasi. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas yang layak, termasuk dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, kenyataannya, banyak lembaga yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan ini, sehingga menciptakan kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang sering melekat pada penyandang disabilitas, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana disabilitas sering kali dianggap sebagai beban oleh sesama narapidana dan petugas, yang dapat mengakibatkan perlakuan diskriminatif. Diskriminasi ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang ada, dan dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan isolasi sosial. Penelitian oleh Hidayah (2018) dalam bukunya *Kesehatan Mental Narapidana: Pendekatan Psikologis dan Sosial* menunjukkan bahwa stigma dan perlakuan diskriminatif dapat memperburuk kondisi kesehatan mental narapidana, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya dapat membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, kurangnya program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk narapidana disabilitas juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak program yang ada tidak mempertimbangkan kebutuhan unik dari individu dengan disabilitas, sehingga mereka tidak mendapatkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah penjara. Buku *Rehabilitasi Sosial Narapidana: Teori dan Praktik* oleh Hamid (2015) menekankan pentingnya pengembangan program rehabilitasi yang inklusif yang dapat menjawab kebutuhan semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Tanpa adanya program yang sesuai, narapidana disabilitas berisiko tinggi untuk mengalami kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka residivisme. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kondisi di lembaga pemasyarakatan, termasuk

meningkatkan infrastruktur agar lebih ramah disabilitas, serta mengembangkan program rehabilitasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan yang lebih baik dan dukungan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana disabilitas, sehingga mereka dapat menjalani rehabilitasi yang efektif dan berhasil reintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya hak asasi manusia mereka yang terpenuhi, tetapi juga kualitas rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan dapat meningkat secara signifikan, memberikan harapan baru bagi mereka yang terpinggirkan dalam sistem pemasyarakatan.

Kurangnya Program Khusus: Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pelatihan dan dukungan yang sesuai dengan kondisi mereka, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang efektif. Banyak program rehabilitasi yang dikembangkan dengan pendekatan satu ukuran cocok semua, tanpa mempertimbangkan kebutuhan unik dari individu dengan disabilitas. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan yang ditawarkan mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atau minat narapidana disabilitas, atau tidak mempertimbangkan keterbatasan fisik mereka. Akibatnya, mereka sering kali merasa terasing dan tidak termotivasi untuk berpartisipasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program tersebut. Kurangnya program yang sesuai juga dapat berdampak pada kesiapan narapidana disabilitas untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Tanpa pelatihan dan dukungan yang tepat, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara dan mencari pekerjaan yang sesuai. Hal ini dapat meningkatkan risiko mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan kriminal, yang pada akhirnya menghambat proses reintegrasi sosial yang diharapkan. Buku *Rehabilitasi Sosial Narapidana: Teori dan Praktik* oleh Hamid (2015) menekankan pentingnya program rehabilitasi yang komprehensif dan berpusat pada individu, yang dapat membantu narapidana disabilitas mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat individu, serta program pendidikan yang dapat membantu mereka memperoleh kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sesuai. Selain itu, dukungan psikologis dan konseling juga penting untuk membantu narapidana disabilitas mengatasi tantangan emosional dan sosial yang mungkin mereka hadapi selama proses rehabilitasi. Dengan adanya program rehabilitasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan, narapidana disabilitas dapat memperoleh pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mandiri. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tingkat kriminalitas dan peningkatan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memprioritaskan pengembangan program rehabilitasi yang sesuai bagi narapidana disabilitas sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang adil dan inklusif.

Stigma dan Diskriminasi: Narapidana disabilitas sering kali mengalami stigma yang signifikan dari sesama narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan. Stigma ini muncul dari pandangan sosial yang keliru dan stereotip negatif tentang penyandang disabilitas, yang menganggap mereka sebagai individu yang kurang mampu atau tidak berharga. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, stigma ini dapat memperburuk isolasi sosial yang sudah mereka alami, membuat mereka merasa terasing dan tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa stigma dapat menciptakan suasana yang tidak mendukung bagi narapidana disabilitas, di mana mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program

rehabilitasi yang ditawarkan. Dampak dari stigma ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berpengaruh langsung pada kesehatan mental narapidana disabilitas. Ketika mereka terus-menerus menghadapi perlakuan diskriminatif dan penilaian negatif, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Buku *Kesehatan Mental Narapidana: Pendekatan Psikologis dan Sosial* oleh Hidayah (2018) menekankan bahwa kondisi mental yang buruk dapat menghambat proses rehabilitasi, karena narapidana yang merasa tertekan atau tidak berdaya cenderung tidak akan berpartisipasi secara aktif dalam program yang ada. Dalam banyak kasus, mereka mungkin merasa bahwa usaha mereka untuk berubah tidak akan dihargai, sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap rehabilitasi. Selain itu, stigma yang dialami oleh narapidana disabilitas dapat menghalangi mereka untuk membangun hubungan positif dengan petugas dan sesama narapidana. Hubungan yang baik dengan petugas pasyarakatan sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi, karena petugas memiliki peran kunci dalam memberikan bimbingan dan dukungan. Namun, jika narapidana disabilitas merasa tidak diterima atau dihargai, mereka mungkin enggan untuk berinteraksi dengan petugas atau terlibat dalam program rehabilitasi. Hal ini menciptakan siklus negatif di mana kurangnya partisipasi dalam program rehabilitasi semakin memperkuat stigma yang ada, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari situasi tersebut. Untuk mengatasi masalah stigma ini, penting bagi lembaga pasyarakatan untuk mengimplementasikan program pelatihan dan kesadaran bagi petugas dan narapidana lainnya tentang pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan meningkatkan pemahaman tentang disabilitas dan mengurangi stereotip negatif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana disabilitas. Selain itu, program rehabilitasi yang melibatkan narapidana disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan dapat membantu mereka merasa lebih dihargai dan berdaya. Dengan demikian, mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang inklusif dapat meningkatkan kesehatan mental dan motivasi narapidana disabilitas untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Pembahasan ini mengacu pada teori-teori yang telah diuraikan dalam kerangka teori, menunjukkan bagaimana keterbatasan akses dan stigma sosial saling berinteraksi untuk menciptakan hambatan yang signifikan bagi rehabilitasi narapidana disabilitas.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan akses memiliki dampak yang signifikan terhadap rehabilitasi narapidana disabilitas. Keterbatasan ini mencakup kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, program rehabilitasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, serta stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi dari sesama narapidana dan petugas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat menghambat proses rehabilitasi yang efektif, mengurangi motivasi narapidana disabilitas untuk berpartisipasi, dan menciptakan hambatan bagi reintegrasi sosial mereka setelah menjalani hukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hamid (2015) dalam bukunya *Rehabilitasi Sosial Narapidana: Teori dan Praktik*, yang menekankan pentingnya program rehabilitasi yang komprehensif dan berpusat pada individu untuk membantu narapidana disabilitas mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, penelitian ini menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di lembaga pasyarakatan. Ini mencakup infrastruktur yang aksesibel, seperti jalur akses yang memadai dan toilet khusus, serta lingkungan yang mendukung bagi narapidana disabilitas. Selain itu, pengembangan

program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka juga sangat penting. Program ini harus dirancang untuk memenuhi minat dan kemampuan individu, serta memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Dukungan psikologis dan konseling juga harus disediakan untuk membantu narapidana disabilitas mengatasi tantangan emosional dan sosial yang mereka hadapi selama proses rehabilitasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap narapidana disabilitas. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan dan kesadaran bagi petugas dan narapidana lainnya tentang pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan meningkatkan pemahaman tentang disabilitas dan mengurangi stereotip negatif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana disabilitas. Selain itu, melibatkan narapidana disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program rehabilitasi dapat membantu mereka merasa lebih dihargai dan berdaya. Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi utama yang diberikan adalah perbaikan kebijakan dan praktik di lembaga pemasyarakatan agar narapidana disabilitas dapat memperoleh hak dan layanan yang layak. Ini termasuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas, mengembangkan program rehabilitasi yang inklusif, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi stigma. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan inklusif, di mana narapidana disabilitas dapat menjalani rehabilitasi yang efektif dan memperoleh peluang yang sama untuk berhasil reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Daftar Pustaka

- Hamid, A. (2015). *Rehabilitasi Sosial Narapidana: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, N. (2018). *Kesehatan Mental Narapidana: Pendekatan Psikologis dan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaidi, A. (2016). *Disabilitas dan Pemasyarakatan: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, A. (2017). *Hak Asasi Manusia dan Narapidana: Perspektif Hukum dan Etika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, R. (2019). *Pendidikan dan Rehabilitasi Narapidana Disabilitas*. Malang: UMM Press.
- Mardiana, I. (2020). *Kebijakan Pemasyarakatan untuk Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, E. (2013). *Rehabilitasi Narapidana: Teori dan Implementasi di Lapas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2011). *Keterbatasan Akses dalam Rehabilitasi Narapidana: Studi Kasus di Lapas*. Jakarta: Gramedia.
- Santosa, B. (2018). *Kebijakan Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Disabilitas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Setiawan, A. (2020). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Obor.